

Pembangunan dan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan : Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo

Adeline Nathania Harini Singal ^{1,*}; Bayu Priambodo ²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia; adelinenathania1@gmail.com

*Correspondence : adelinenathania1@gmail.com

ABSTRAK

Menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 terdapat beberapa isu strategis yang berhubungan dengan permasalahan infrastruktur jalan, yaitu pemantapan infrastruktur, optimalisasi kebijakan penataan ruang wilayah perkotaan dan pedesaan, dan integrasi pembangunan infrastruktur. Di Kabupaten Sidoarjo, kecamatan yang memiliki persentase jalan tidak mantap tertinggi adalah Kecamatan Sedati dengan nilai 13,93%. Maka dari itu, diperlukan upaya yang tepat dari pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dalam bidang jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jalan oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo. Teori yang digunakan adalah pembangunan menurut M.L. Jhingan yang berfokus pada syarat keberhasilan pembangunan yang memiliki empat dimensi, yaitu tujuan, penetapan sasaran dan prioritas, kebijaksanaan pembangunan yang tepat, dan dukungan masyarakat. Hasil penelitian didapatkan bahwa pembangunan dan pemeliharaan jalan secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil dalam menangani permasalahan infrastruktur jalan khususnya Kecamatan Sedati yang memiliki presentase jalan tidak mantap paling tinggi di Kabupaten Sidoarjo.

Kata kunci

*Pembangunan, Perbaikan
Infrastruktur Jalan*

ABSTRACT

According to the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of Sidoarjo Regency for the period 2021-2026, several strategic issues related to road infrastructure have been identified, namely infrastructure consolidation, optimization of spatial planning policies in urban and rural areas, and integration of infrastructure development. In Sidoarjo Regency, the district with the highest percentage of unstable roads is Sedati District, with a value of 13.93%. Therefore, appropriate efforts from the government are needed to provide public services in the field of road infrastructure. The objective of this study is to understand how road construction and maintenance rehabilitation are carried out by the Department of Public Works (Dinas PU) for Building Roads and Water Resources (Bina Marga and SDA) of Sidoarjo Regency. The theory used is development according to M.L. Jhingan, which focuses on the conditions for the success of development, encompassing four dimensions: goals, setting objectives and priorities, appropriate development policies, and community support. The research findings reveal that overall road construction and maintenance can be considered successful in addressing road infrastructure issues, particularly in Sedati District, which has the highest percentage of unstable roads in Sidoarjo Regency.

Keywords

*Development, Road
Infrastructure Improvement*

Pendahuluan

Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Salah satu contoh pembangunan adalah pembangunan sarana dan prasarana pengembangan infrastruktur jalan. Menurut (Pambudi, dkk, 2022) infrastruktur jalan memiliki arti sebagai penopang pertumbuhan serta produktivitas dalam sebuah negara. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami infrastruktur jalan sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam beraktivitas.

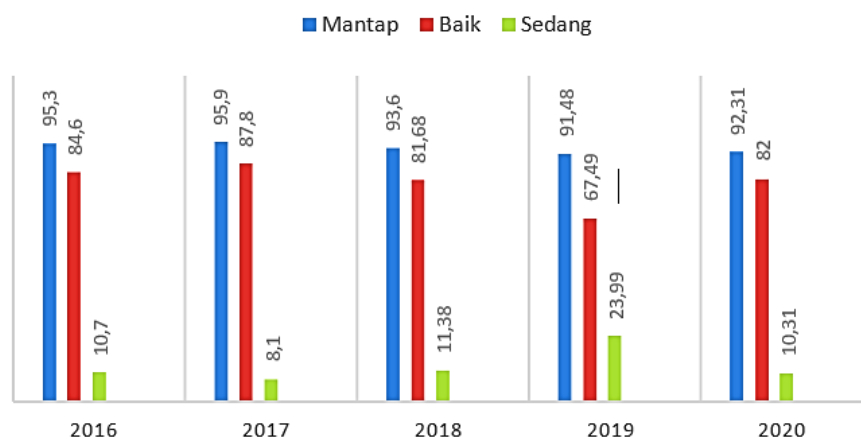
Permasalahan infrastruktur jalan adalah permasalahan utama yang sering ditemui. Kejadian ini biasanya ditemui di wilayah pedesaan. Mulai dari kurangnya akses jalan menuju persawahan ataupun ke kebun, jembatan antar desa tidak memadai akibat tidak adanya pemeliharaan dari dinas terkait, dan kurang meratanya pembangunan akibat pelaksanaan pembangunan yang berfokus hanya dipertanian saja. Hal ini disebabkan karena kurangnya akses infrastruktur yang tersedia di pedesaan. Infrastruktur yang memadai memberikan manfaat seperti meningkatkan pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan memperluas layanan sosial lainnya serta akses masyarakat pedesaan yang akan mempercepat transformasi ekonomi desa (Kamaludin, dkk., 2022).

Dalam rangka melakukan pembangunan sebuah wilayah memerlukan arah kebijakan pembangunan pada bidang pembangunan fisik yang berupa pembangunan infrastruktur. Pada RPJMD tersebut, Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2021-2026 telah menetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi yang ingin dicapai yaitu "Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan". Salah satu misi ke-3 Bupati Sidoarjo menyebutkan "Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan". Pada misi ke-3 di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung ekonomi dan sosial, dengan pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Tujuan misi tersebut adalah meningkatkan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan sarannya adalah tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata. Hal ini disebabkan karena kawasan Sidoarjo berada pada pusat pertumbuhan ring satu Jawa Timur bersama dengan Kota Surabaya dan Gresik, yang mana menuntut penyediaan infrastruktur perkotaan dan terintegrasi yang terpadu. Untuk membantu mewujudkan pemerataan infrastruktur jalan diperlukan langkah yang tepat untuk mendukung terjadinya sebuah perubahan seperti pembangunan infrastruktur jalan.

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perpanjangan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah tersebut, untuk menangani pengerjaan pekerjaan pembangunan infrastruktur tersebut, Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang menyusun tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang terkandung dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yaitu bertujuan tersedianya infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air yang berkualitas dan merata, dengan sasaran tersedianya Infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas dan merata, dengan strategi peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan jalan, dalam arah kebijakan peningkatan kuantitas dan kualitas jalan.

Berdasarkan Renstra tersebut, yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo dengan memperbaiki jalan tidak mantap di Kabupaten Sidoarjo dengan betonisasi jalan dan rehabilitasi pemeliharaan jalan dengan pengaspalan. Jalan Mantap sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 13/PRT/M/2011 pada pasal 15 yakni ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang. Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar.

Gambar 1. Persentase Perkembangan Kondisi Jalan Mantap Kabupaten Tahun 2016 – 2020



Sumber: Renstra Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo 2021-2026

Dari gambar 1 di atas, menunjukkan bahwa persentase kondisi jalan mantap pada tahun 2017 menunjukkan angka 95,95 % yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, namun mengalami penurunan menjadi 93,06% di tahun 2018, tahun 2019 kembali naik menjadi 93,43% dan kembali turun ke tingkat 92,31% pada tahun 2020.

Berdasarkan Renstra Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo, terdapat beberapa kecamatan dengan jalan mantap dan jalan tidak mantap menurut tingkat kewenangan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, seperti pada tabel 1 berikut ini

Tabel 1. Jalan Mantap dan Jalan Tidak Mantap Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo

No.	Kecamatan	Jalan Mantap (%)	Jalan Tidak Mantap (%)
1.	Buduran	95,41	4,59
2.	Sidoarjo	98,94	1,07
3.	Jabon	92,81	7,19
4.	Tanggulangin	93,59	6,41
5.	Porong	100	0
6.	Prambon	90,67	9,33
7.	Krembung	91,56	8,44
8.	Tulangan	96,06	3,94
9.	Tarik	93,44	6,56
10.	Wonoayu	99,72	0,28
11.	Candi	93,92	6,08
12.	Sedati	86,07	13,93
13.	Gedangan	94,06	5,94
14.	Waru	96,72	3,28
15.	Sukodono	92,69	7,31
16.	Taman	95,41	4,59
17.	Krian	97,49	2,51
18.	Balongsendo	96,80	3,20

Sumber: Renstra Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo 2021-2026

Berdasarkan data tabel 1 dari Renstra Dinas PU Bina Marga dan SDA 2021-2026 diatas, Kecamatan Sedati memiliki persentase jalan mantap yang paling kecil dengan angka 13,93 kemudian disusul kecamatan Prambon sebesar 9,33 sedangkan jalan kabupaten di wilayah kecamatan Porong, Wonoayu, dan Sidoarjo hampir seluruhnya dalam kondisi mantap. Salah satu kecamatan yang memiliki persentase jalan tidak mantap tertinggi di Kabupaten Sidoarjo adalah Kecamatan Sedati. Untuk menangani pengerjaan pekerjaan pembangunan infrastruktur pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan perbaikan dengan betonisasi pada beberapa ruas jalan. Betonisasi Jalan dilakukan dengan membeton jalan yang berlubang. Pembetonan jalan merupakan pembuatan lapisan jalan pada jalan yang sudah ada sebelumnya dengan disokong rangka dari baja. Terdapat sembilan kelurahan atau desa yang jalan kabupatennya akan dilakukan pembetonan jalan oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo, diantaranya di desa Krembung-Tulangan, Tulangan-Durungbendung, Tarik-Mlirip, Bringinbendo-Tanjungsari, Banjarsari- Damarsi, Geluran-Suko, Tropodo 1, Kwangsan, dan Banjarpanji-Tanggulangin. Kemudian untuk peningkatan kualitas jalan dengan beton, terdapat sembilan kelurahan atau desa yang jalan kabupatennya akan dilakukan pembetonan jalan, salah satunya ada di Desa Kwangsan, Kecamatan

Sedati. Sedangkan dalam pemeliharaan jalan, Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo melakukan perbaikan pada jalan yang berlubang yaitu penambalan dengan aspal.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang membahas permasalahan pembangunan infrastruktur, menurut (Waruwu et al., 2019) menyampaikan program pembangunan infrastruktur di Desa Bawo, Kabupaten Kepulauan Sitaro belum mencapai tujuan karena masyarakat merasa belum puas akibat ketidaktransparannya pemerintah terhadap anggaran program, selanjutnya (Setyowati, M. A., & Larasati, E. 2019) menunjukkan bahwa program pembangunan infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kabupaten Temanggung Tahun 2014 sudah berjalan secara optimal sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, kemudian penelitian oleh (Sukwika, T. 2018) menunjukkan peran pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi yang menunjukkan masih terdapat ketimpangan pada jalan, terakhir (Sasmito et al., 2017) menemukan bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pamekasan sudah berjalan dengan baik karena dilakukan secara terus terang oleh pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa implementasi pembangunan infrastruktur yang sudah berlangsung dengan baik, hal ini dibuktikan bahwa masyarakat sudah merasakan dampak dari adanya pelaksanaan perbaikan infrastruktur. Pada penelitian ini, akan dibahas mengenai pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini perlu lebih lanjut dilakukan mengenai pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo. Peneliti berfokus pada pelaksanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Sedati. Guna memperoleh data yang menyeluruh penulis menggunakan teori pembangunan yang berfokus pada syarat keberhasilan pembangunan menurut M.L Jhingan dengan empat dimensi, yaitu tujuan, penetapan sasaran dan prioritas, kebijaksanaan pembangunan yang tepat, dan dukungan masyarakat. Manfaat penelitian secara teoritis pada bidang ilmu administrasi publik diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan administrasi publik, khususnya pada sektor pembangunan publik menggunakan teori pembangunan. Manfaat secara praktis bagi Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi, wawasan, dan pemikiran sebagai masukan dan saran dalam memberikan pelayanan yang baik dan lebih efektif bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif bisa mendapatkan semua fenomena yang dibutuhkan untuk penelitian agar dapat memahami fenomena dengan baik. Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran yang mendalam terkait Pembangunan dan Rehabilitasi

Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo. Fokus pada penelitian ini menggunakan teori pembangunan dari M.L Jhingan dengan empat dimensi syarat keberhasilan pembangunan, yaitu tujuan, penetapan sasaran dan prioritas, kebijaksanaan pembangunan yang tepat, dukungan masyarakat. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Data primer didapatkan dari wawancara kepada informan secara mendalam pada implementor Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo dan cataran lapangan dari hasil penelitian. Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan dengan dua teknik yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Key informan* pada penelitian ini adalah Kepala Bidang jalan dan jembatan Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian *key informan* memberikan rujukan untuk menambah informasi pada penelitian ini yang ditemukan dengan *snowball sampling* yaitu pegawai bidang jalan dan jembatan Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo, serta masyarakat desa untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan perbaikan jalan. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana dengan empat cara, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada penelitian ini menggunakan uji keabsahan data yaitu teknik kredibilitas data (*credibility*) dengan memastikan data yang diperoleh sudah cocok atau belum dengan cermat, serta dilakukan secara triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Tujuan

Dalam melakukan pembangunan kewilayahan yang berimbang, pemerintah harus memiliki arah tujuan yang matang dan mantap agar pembangunan dapat berdaya dan berhasil guna. Penentuan tujuan dalam pembangunan adalah untuk mengetahui kondisi daerah yang akan dijadikan sasaran pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan, dan mencapai pembangunan kewilayahan yang berimbang. Maka diiharapkan pelaksana pembangunan yaitu Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo dapat melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jalan di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan kondisi wilayah. Tujuan dari pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan adalah untuk memberikan pelayanan publik pada bidang jalan dan melancarkan mobilisasi masyarakat. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh *key informan*, Rizal selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

“Sebelum adanya perbaikan jalan ini, kami mendapatkan laporan dari masyarakat yaitu banyak jalan yang berlubang, dan saat hujan jadi tergenang yang mengakibatkan ada masyarakat yang jatuh akibat jalan licin. Sehingga harapannya dengan memperbaiki jalan ini nantinya dapat membantu kelancaran aktivitas masyarakat. (Hasil wawancara 5 Februari 2024)

Berdasarkan temuan dilapangan, tujuan dari pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jalan telah dirasakan oleh masyarakat. Dari yang sebelumnya kondisi infrastruktur jalan kabupaten di desa banyak yang rusak dan

menyebabkan akses jadi terganggu. Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan dari Eko selaku masyarakat, yang menyebutkan :

“kalau dulu memang jalan ini diaspal tapi sering berlubang tapi ya cuma ditambal-tambal saja. Apalagi kalau musim hujan sering membahayakan masyarakat soalnya jalannya jadi tidak rata.”
(Hasil wawancara 6 Februari 2024)

Perbaikan jalan hanya dilakukan dengan penambalan aspal saja yang akan berisiko berlubang kembali dan jalan yang hanya ditambal saja ini menyebabkan permukaan jalan menjadi tidak rata dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jalan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan serta melihat kondisi wilayah yaitu dengan melihat kendaraan yang melintas dikategorikan kendaraan berat atau bukan dengan melihat kerusakan jalan di wilayah tersebut. Untuk keberhasilan tujuan pembangunan, penggunaan anggaran harus dimanfaatkan secara maksimal. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian (Agustin, M, 2016). yang menyebutkan pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa adanya anggaran. Anggaran yang digunakan bersumber dari APBD dan DAK yang berasal dari APBN. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dimensi Tujuan telah dilaksanakan dengan baik. Sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo sudah dikatakan berhasil dibuktikan dengan jalan yang menjadi lebih baik dan tidak berlubang lagi, sehingga dengan adanya perbaikan jalan ini memudahkan aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

2. Penetapan Sasaran dan Prioritas

Dimensi ini digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan untuk mengetahui kondisi pelaksanaan pembangunan dan mengukur hasil sasaran pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jalan oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan dengan baik. Ditinjau dari aspek kesesuaian sasaran, pelaksanaan pembangunan ini merupakan kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh Pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam (Masruhin, A., & Kaukab, M. E. 2019) yang menyebutkan adanya kejelasan sasaran nantinya akan memudahkan untuk mengamankan keberhasilan maupun kegagalan untuk mencapai sasaran prioritas yang sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber yang menyebutkan penetapan sasaran disusun dengan survey lapangan oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo untuk pemilihan wilayah desa. Sedangkan untuk penetapan prioritas adalah berdasarkan kondisi jalan dan usulan dari masyarakat, seperti pernyataan Dani sebagai masyarakat sebagai berikut :

“Betonisasi dan pemeliharaan bisa tercapai itu kita pertamanya melakukan survey terlebih dahulu, misalnya disebuah jalan ini sudah dilakukan 4 sampai 5 kali pemeliharaan jalan itu akan kami fokuskan untuk dibeton supaya tidak biaya pemeliharaan jalan sangat banyak, kalau di beton maka

biaya pemeliharaannya akan berkurang sehingga kita bisa mengalihkan ke ruas jalan lain yang memerlukan pemeliharaan dan menghemat anggaran juga. Jadi untuk menentukan skala prioritas itu kita petakan dulu mana yang mau di beton dan di aspal” (Hasil wawancara, 6 Februari 2024)

Gambar 2. Kondisi Setelah Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Senopati, Betro, Kecamatan Sedati



Sumber: Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo

Gambar 3. Kondisi Ruas Jalan Ir. Juanda, Kwangsari, Kecamatan Sedati Setelah Betonisasi



Sumber: Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dimensi penetapan sasaran dan prioritas, dapat disimpulkan bahwa dimensi penetapan sasaran dan prioritas Pembangunan dan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo sudah dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari para pelaksana pembangunan sebelum memperbaiki jalan melakukan survey untuk melihat kondisi wilayah desa. Selain itu penentuan skala prioritas yaitu berdasarkan banyaknya pemeliharaan jalan dalam setahun yang kemudian apabila terlalu sering dilakukan pemeliharaan akan dilakukan rekonstruksi (betonisasi). Selain itu pelaksana pembangunan juga mendengar usulan masyarakat terkait kerusakan jalan.

3. Kebijaksanaan Pembangunan Yang Tepat

Menurut M.L Jhingan, kebijaksanaan pembangunan yang tepat diperlukan agar pelaksana pembangunan mengerti apa kebijaksanaan pembangunan yang tepat untuk mencapai keberhasilan pembangunan serta tidak mengalami hambatan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Penentuan kebijaksanaan pembangunan dilakukan dengan melihat usulan dari masyarakat yang disampaikan oleh Kepala Desa, Kelurahan, dan Camat. Selanjutnya dilakukan survey yang kemudian

ditentukan perbaikan jalan yang sesuai berdasarkan kondisi wilayah desa. Hal itu sesuai dengan pendapat menurut (Irmansyah, I., dkk, 2021) kebijaksanaan yang tepat, masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan karena melibatkan masyarakat, Pemerintah dan pihak swasta, seperti pada penyampaian menurut Margaretha sebagai pegawai Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

“Pelaksanaan kegiatan itu berdasarkan dari usulan masyarakat melalui Kepala Desa, setelah itu dilakukan pengamatan dengan yang kemudian diusulkan ke tim anggaran untuk dilakukan betonisasi atau pemeliharaan jalan. Untuk perencanaannya kita hire dari pihak konsultan, tetapi untuk pemeliharaan jalan dari dinas sendiri surveynya” (Hasil wawancara, 5 Februari 2024)

Pelaksana pembangunan harus memikirkan dengan matang kebijaksanaan pembangunan yang sesuai dengan mengambil keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan ini ditindaklanjuti dengan perencanaan pembangunan. Kemudian Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo selaku pelaksana pembangunan mengadakan lelang terhadap PT atau CV yang akan melakukan pembangunan. sehingga nanti bisa dilakukan pengerjaan dan didampingi oleh konsultan pengawas dan kortim. PT atau CV yang terpilih melalui lelang akan bekerja sesuai kontrak dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang berisikan macam pekerjaan, tanggal mulai kerja, waktu penyelesaian, dan denga apabila terjadi keterlambatan pembangunan. Untuk faktor pendukung atau penghambat itu sebenarnya sudah diantisipasi langsung sama PT atau CV nya, karena sudah ada antisipasinya contohnya perusahaan tersebut akan menyediakan terpal untuk menutupi betonnya dan dalam setelah dibangun maka akan dilakukan penutupan penyiraman beton.

Gambar 4. Penutupan dan Peyiraman Beton



Sumber: Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo

Sebagai pelaksana pembangunan, Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo melakukan evaluasi apabila terjadi hambatan atau masalah yang ditemukan dalam suatu kegiatan pembangunan. Evaluasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan rapat evaluasi yaitu monitoring evaluasi (monev). Hal ini sesuai dengan pendapat menurut (Anggara, S., & Sumantri, I. 2016) pelaksanaan pembangunan yang dilakukan harus terus dipantau dan di evaluasi perkembangannya untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan yang kemudian diukur dengan sasaran yang ingin dicapai, hal

tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan Kepala Bidang jalan dan jembatan, sebagai berikut :

“kita selalu mengadakan rapat evaluasi namanya monev. Kita juga menggandeng dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk memantau hasil pekerjaan ini supaya tidak ada penyelewengan terkait anggaran, jadi kita tetap evaluasi.” (Hasil wawancara 5 Februari 2024)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pembangunan Yang Tepat yang telah dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo sudah dilaksanakan dengan membagi tugas pokok sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab pegawai dan tetap melaksanakan monitoring evaluasi apabila terjadi masalah yang ditemukan dalam suatu kegiatan pembangunan.

4. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Pembangunan membutuhkan dukungan dari masyarakat, karena tanpa adanya dukungan dari masyarakat, tidak ada perencanaan yang dapat berhasil. Hal ini sangat berkaitan dengan peran masyarakat dalam bentuk dukungan dan peran Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo dalam melibatkan *stakeholders* dari pihak swasta ataupun masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Bentuk dukungan yang diberikan dari masyarakat disampaikan melalui *call center* 112, WhatsApp, Instagram Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo, email, dan surat resmi.

Gambar 5 . Wadah Pengaduan Kerusakan Jalan



Sumber: Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo

Informasi dari masyarakat ini sangat penting untuk penanganan secara cepat dan tepat terkait kerusakan jalan. Informasi tersebut digunakan untuk mendapatkan laporan dan usulan guna perencanaan pembangunan, dikarenakan masyarakat selalu melewati dan merasakan jalan di pemukiman tersebut sehingga aduan tersebut akan di prioritaskan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawan et al., (2020) yang menyebutkan bahwa tujuan dari dukungan masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan

masyarakat, pelaksana pembangunan dapat mengerti pandangan dan kebutuhan dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, dalam perawatan dan pemeliharaan dari masyarakat tidak ditemui adanya kerja bakti untuk membersihkan gorong-gorong atau sebagainya. Kerja bakti hanya dilakukan untuk kebersihan kampung saja bukan ditujukan untuk hasil dari pembangunan perbaikan jalan, pernyataan tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Eko selaku masyarakat, sebagai berikut :

"Dari masyarakat ini gak ada sih kayak membantu membersihkan gorong-gorong itu, kan sudah ada gorong-gorong nya jadi ya airnya akan meresap sendiri. Kebersihan gorong-gorong biasanya dikoordinir sama RT/RW masing-masing tapi ya sekedar kegiatan rutin saja." (Hasil wawancara 6 Februari 2024)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi Dukungan Masyarakat telah dilakukan oleh masyarakat dengan ikut menjaga hasil dari pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu masyarakat juga dilibatkan dalam mewedahi keluhan maupun usulan dari masyarakat dengan menyediakan layanan *call center* 112, whatsapp, instagram Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo, email, dan surat resmi.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, hasil dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti sebelumnya mengenai Pembangunan dan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori pembangunan M.L Jhingan dengan empat dimensi, yaitu tujuan, penetapan sasaran dan prioritas, kebijaksanaan pembangunan yang tepat, dan dukungan masyarakat dalam penelitian ini menunjukkan secara keseluruhan sudah berlangsung dengan baik, dari tujuan jalan yang telah diperbaiki dapat dikatakan menjadi baik dan tidak berlubang lagi. Akses dan mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah dan mengurangi angka kecelakaan akibat jalan berlubang, pada dimensi penetapan sasaran dan prioritas sudah berhasil dalam melaksanakan pembangunan perbaikan jalan berdasarkan skala prioritas dan masyarakat sudah merasakan manfaat dari perbaikan jalan. Semua tahapan dalam kebijaksanaan tersebut bertujuan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat dalam pengambilan keputusan, serta didapatkan masyarakat mendukung dan menerima pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan.

Referensi

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Adipuryanti, N. L. P. Y., & Sudibia, I. K. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Piramida*,

11(1).

- Agustin, M. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). *Publika*, 4(1).
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi pembangunan: Teori dan praktik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Astuti, S., et al. (2022). The Effect Of Road Infrastructure Development On The Welfare Of The Community In Kayu Ara Village, Tulung Selapan Regency, Oki Regency, Selatan Sumatra. <https://doi.org/10.47353/bj.v2i1.65>
- Budiman, A. (2016). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Christianingrum, S. I., & Djumiarti, T. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Semarang Timur. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2).
- Engkus, E. (2018). Perspektif Administrasi Pembangunan: Menuju Ke Arah Konvergen. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2).
- Fandra, B., et al. (2022). Evaluation Of Community Satisfaction Level On The Quality Of Village Road Infrastructure Development In The Village Fund Program. *Jurnal Darma Agung*, 30(2).
- Faradis, R. (2020). Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Indeks Komposit Pembangunan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Indonesia Indeks Komposit Pembangunan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Indonesia Pendahuluan Capaian hasil pembangunan suatu negara dapat. 20(1). <https://doi.org/10.21002/jepi.2020.03z>
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2).
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hidayati, I. (2021). Urbanisasi dan Dampak Sosial di Kota Besar Indonesia. 7(2).
- Iriyena, P., et al. (2019). Analisis pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten kaimana 2007-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02).
- Irmansyah, I., et al. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(2).
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamaludin, et al. (2022). Village Road Quality and Accessibility on Transforming Rural Development. 8(2).
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal*

- Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67–78.
<https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Lisnawati, L., & Lestari, S. (2019). Analisis faktor pembangunan desa dalam pengembangan desa mandiri berkelanjutan pada Desa Bunghu Aceh Besar. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 4(2).
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa (studi empiris pada perangkat desa di kecamatan mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, business and Engineering (JEBE)*, 1(1).
- Mojosari, K., & Mojokerto, K. (2018). Jurnal Penelitian Administrasi Publik | Vol 5 No. 2 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. 5(2).
- Pambudi, et al. (2022). Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Provinsi Papua Barat,. 7(2).
- Sasmito et al. (2017). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(3).
- Setiawan et al. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung Studi Kasus di Desa Margamukti , Desa Sayati , Desa Ciburial dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung.
- Setyowati, M. A., & Larasati, E. (2019). Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Ppip) Di Kabupaten Temanggung Tahun 2014. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1).
- Simbolon, D. S., et al. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. 6. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2>
- Syukri, A. F., & Widiastuti, W. (2021). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah 2019. *J. Ilmu Adm. Publik*, 6(1), 42-52.
- Wahyuningsih, C. D. (2021). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Mimbar Administrasi*, 18(1).
- Wardhana, A., et al. (2020). Dinamika Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi*, 25(1).
- Winantasari, D., & Mustofa, A. (2024). Evaluasi Penggunaa Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Dalam Mendukung Keberhasilan Pembangunan Di Kecamatan Trowulan Kab Mojokerto. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 2(1).